

**Naskah Publikasi**

**RELASI KUASA DALAM JEJARING PENDANAAN DAN PROGRAM  
NGO DI YOGYAKARTA**

**Studi Kritis Atas Corporate Social Responsibility (CSR)**

Disusun Oleh:

Dendy H. Nanda

07331104

Telah disahkan dosen Pembimbing skripsi pada.....

Dosen pembimbing skripsi

**Muzayin Nazaruddin, S. Sos**

**NIDN 0516087901**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Universitas Islam Indonesia

**Anang Hermawan, S. Sos, M.A**

**NIDN**

## **STUDI KRITIS ATAS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR):**

### **Relasi Kuasa dalam Jejaring Pendanaan dan Program LSM di Yogyakarta**

#### **Abstract**

*Fund of Corporate Social Responsibility (CSR) from foreign companies that enter into the donor then channeled to NGOs in Yogyakarta is a form of neocolonialism. Donor agencies with the power of the funds had tried to spread rumors and democratization via NGOs in Indonesia, especially in Yogyakarta. While the discourse on the stretcher democratization the donor is trying to spread is an attempt to welcome the power of neoliberalism. Democratization is an ideology that move the wheels of capitalism*

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility, Non Government Organitations, power relations, panopticon, neocolonialism, democratization, neoliberalism.*

#### **Pendahuluan**

Awal mula perkembangan *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial perusahaan terjadi sekitar tahun 1900-an. Hal ini didasari konsep kekayaan di Amerika Serikat. Pencetusnya yaitu pengusaha yang memiliki perusahaan US Steel Andrew Carnegie. Carnegie mengatakan bahwa bisnis mengadakan kekayaan atau sumber-sumber milik masyarakat, dan mengembalikan sebagian besar dari hasilnya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri (Poerwanto, 2010: 17).

Dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tindakan moral perusahaan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, dimanakah sisi moral dari kegiatan CSR? Apakah dengan membantu korban akibat dari ulah atau kegiatan perusahaan mereka sendiri bisa dikatakan bermoral?

Menurut Milton Friedman sang teoris neoliberal dalam esainya “*The Social Responsibility Of Bisnis is To Increase Its Profits*”, tujuan utama CSR adalah untuk mencari keuntungan semata. Tugas perusahaan adalah mencetak uang sebanyak mungkin, perusahaan tidak perlu memikirkan tanggung jawab sosial kepada masyarakatnya, tugasnya hanyalah melayani *consumer*, dan *costumer* menarik jasa dari produk dan jasa yang dihasilkan. CSR tidak lebih hanya sekedar sebagai strategi bisnis perusahaan dalam menjaga citra perusahaan (Widjaja & Pratama, 2008: 52).

Bahkan ditambahkan Akbar (Kompasiana.com, 3 Oktober 2010), CSR merupakan alat bantu, agar kelompok yang sedang berada dalam tekanan ekonomi tidak menjadi gelap mata karena penderitaannya itu. Namun, tidak sedikit yang percaya bahwa CSR hanya satu bagian kecil dari upaya mewujudkan masyarakat 20:80, suatu keadaan dimana seperlima dari keseluruhan populasi menguasai 80% kekayaan. CSR, menurut pandangan ini, hanyalah bagian dari suatu teknik bagaimana agar masyarakat menerima 20% kekayaan ekonomi tetap merasa nyaman, ketika 80% sumber daya ekonomi dikuasai oleh seperlima kelompok dari mereka.

Hal ini semakin meyakinkan peneliti bahwa kegiatan CSR tidak lebih sebagai akal-akalan perusahaan untuk mengembalikan citra perusahaan yang terkena kasus atau kritikan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Atau sebagai upaya pembentukan citra perusahaan dikalangan masyarakat untuk melegalkan perbuatan perusahaan mereka yang sebenarnya bermasalah. CSR merupakan sebagai salah satu upaya untuk mengambil hati masyarakat agar bersimpati pada

perusahaan. Dapat dianalogikan, CSR adalah obat penenang yang semu tetapi tidak menyembuhkan.

Belakangan, dana program CSR perusahaan (baik perusahaan asing maupun domestik) masuk ke lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Menurut *Commons Dreams* (2005), pendanaan korporat ke LSM telah bertumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun ini (kelompok kerja Akuntabilitas OMS, 2006: 182). Data dari *Centre on Philanthropy* pada tahun 2005, donasi korporat Amerika Serikat ke lembaga amal dan yayasan-yayasan mencapai US\$500 juta. (Kelompok Kerja Akuntabilitas OMS, 2006: 169).

Di Indonesia, misalnya, *Institute for Studies Multiculturale and Pluralisme (IMPULSE)* dan *Combine Resourch Indonesia (CRI)*. Dua NGO yang bergerak di bidang pemberdayaan politik masyarakat dan penelitian ini didanai oleh salah satu pelaku bisnis atau investor besar Amerika Serikat, George Soros. Dengan bertolak pada spirit peduli sosial, George Sorros membentuk “yayasan” Open Society Institute. Open Society Institute merupakan bagian dari pelembagaan semangat CSR. Dari Open Society Institute inilah, dana-dana CSR dikucurkan melalui lembaga *funding* di bawah asuhannya ke NGO-NGO di tanah air, seperti Yayasan Tifa.

Masuknya dana perusahaan asing ke LSM yang bergerak di bidang kemasyarakatan tentunya sangat mengherankan, melihat semangat korporasi dan LSM sangatlah berbeda. Korporasi yang orientasinya pada keuntungan finansial sangat kontras dengan NGO atau LSM, yang menurut Jhon Locke, merupakan

bagian dari peradaban yang berada di luar kendali pemerintah dan pasar (*market*) termarginalisasi oleh keduanya (Widjajanto, 2007: 5), yang orientasinya adalah pemberdayaan masyarakat dan merupakan lembaga non-profit.

Menjadi menarik kemudian, memperhatikan relasi-kuasa yang dilakukan korporasi pada NGO melalui jejaring pendanaan yang mereka salurkan. Kuasa yang dimaksud disini bukan siapa menguasai siapa, tetapi lebih pada strategi atau kepentingan yang ada di dalam relasi antara perusahaan dan LSM. Mengikuti pemikiran Foucault, kekuasaan tak harus tunggal atau diandaikan sebagai posisi tertentu yang rigid. Tetapi juga berupa regulasi dan aturan-aturan main yang dibentuk seperti jejaring pendanaan korporasi pada LSM.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana relasi kuasa dalam jejaring pendanaan dan program LSM di Yogyakarta? Sehubung dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana relasi kuasa yang terjadi pada jejaring pendanaan dan program NGO di Yogyakarta.

## **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersandar pada paradigma kritis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., (Moleong, 2010: 6).

Paradigma kritis memandang keberadaan manusia adalah hal yang memungkinkan untuk dikritisi agar masyarakat mengalami perubahan dan menjadi emansipasif. Paradigma ini bertujuan untuk membuka, memindahkan dan membuang keyakinan-keyakinan serta ide-ide keliru tentang masyarakat dan realitas sosial serta ada ketertarikan pada hal-hal yang tersembunyi dan tidak menjadi kepedulian karena realitas yang dihalangi secara utuh. (Audifax, 2008: 28-29).

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara dan observasi. Data yang telah didapat dari hasil wawancara dan observasi akan dilakukan analisis data. Ada beberapa langkah dalam melakukan analisis data. Pertama, reduksi data, yaitu kegiatan memilah-milah data yang tidak beraturan menjadi pola dan susunan yang lebih sederhana. Kedua, katagorisasi data, yaitu upaya memilah-milah hasil temuan penelitian kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Ketiga, Penyajian data, proses ini merupakan penyajian data hasil penelitian yang telah melalui proses reduksi dan katagorisasi data. Keempat, refleksi teori, yaitu proses menguraikan temuan penelitian dengan teori yang berhubungan dengan penelitian. Terakhir atau kelima, adalah penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.

## **Temuan Penelitian**

### **A. Proses Pengajuan Program**

Dalam proses pengajuan program, lembaga donor menggunakan beberapa cara penyampaian. Ada beberapa cara dalam proses penyampain

program kerja. *Pertama*, pengumuman terbuka. Melalui pengumuman terbuka, LSM-LSM bisa bersaing secara bebas dalam mendapatkan dana dari lembaga donor. Semua LSM, baik yang sudah besar maupun LSM baru bebas berkompetisi mendapatkan program kerja dari lembaga donor. Pengumuman terbuka ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu, melalui media massa dan media *online*.

*Kedua*, sosialisasi terbatas. Sosialisasi terbatas bisa juga disebut pengumuman semi-terbuka. Dikatakan semi-terbuka karena pengumuman program kerja tidak dilakukan melalui media, melainkan dengan cara mengundang LSM-LSM tertentu. Lembaga donor secara selektif mengundang LSM-LSM yang mereka percaya, biasanya LSM-LSM yang sudah pernah bekerja sama dengan mereka sebelumnya.

*Ketiga*, hubungan langsung. Hubungan langsung ini didasarkan atas pertemanan dan kepercayaan antara lembaga donor dan LSM. LSM dan lembaga donor sudah sangat dekat dan sering melakukan kerjasama program. Jadi memungkinkan untuk berhubungan secara langsung untuk penggarapan program kerja. Dalam proses hubungan langsung ini ada dua cara yang dilakukan. Pertama, lembaga donor menunjuk langsung satu LSM yang sudah dipercaya untuk menjalankan program kerja. Kedua, LSM mengajukan proposal kerja atau melobi lembaga donor.

## **B. Alasan/Pertimbangan Pemberian Dana**

Ada beberapa alasan dan pertimbangan lembaga donor memberikan dana pada LSM. *Pertama*, kepercayaan. Kepercayaan didasarkan atas beberapa syarat, diantaranya kinerja dan reputasi dari LSM, kapasitas lembaga dan popularitas dari individu dalam suatu LSM.

*Kedua*, pertemanan dan rekomendasi, salah satu faktor lahirnya hubungan pertemanan antara LSM dan lembaga donor adalah rekomendasi. Baik itu rekomendasi antar sesama LSM maupun rekomendasi yang diminta lembaga donor. LSM pemula yang ingin mencari dana program kerja akan meminta rekomendasi dari LSM yang sudah pernah mendapatkan dana dari lembaga donor. Sebaliknya, lembaga donor juga akan meminta kepada LSM yang sudah mereka kenal untuk dicarikan LSM baru yang sanggup mengerjakan program kerja mereka. Selain itu *track record* dari suatu LSM juga menentukan hubungan LSM dan lembaga donor.

## **C. Proses Penentuan Isu**

Dalam dunia kerja LSM ada empat cara yang digunakan untuk menentukan isu kerja LSM. *Pertama*, Mewacanakan isu. Mewacanakan isu sepintas agak mirip dengan mengarahkan. Namun proses pengarahannya tidak dilakukan secara eksplisit. Pewacanaan isu oleh lembaga donor dilakukan dengan sangat sistematis yang kemudian sangat susah dimengerti oleh LSM. Sementara, pihak LSM hanya akan mencocokkan atau mengait-ngaitakan isu

mereka dengan isu yang dibawa oleh lembaga donor. Isu yang dibangun melalui pewacanaan juga cenderung sepihak.

*Kedua*, LSM mengusulkan atau mewacanakan Isu. tidak hanya lembaga donor yang bisa mewacanakan isu. LSM selaku penerima dana juga sering mengusulkan isu pada lembaga donor. LSM mengajukan proposal kerja kepada lembaga donor sesuai dengan isu bentukan mereka. Tentunya LSM yang sering atau bisa mewacanakan isu adalah LSM besar atau sudah dipercaya oleh lembaga donor.

*Ketiga*, Mengarahkan Isu. Ketergantungan LSM yang begitu besar pada lembaga donor adalah penyebab dari leluasanya lembaga donor mengarahkan atau mendikte atau mengarahkan isu LSM. Mengarahkan atau mengatur isu maksudnya adalah capaian akhir atau hasil akhir dari suatu program kerja LSM sudah di desain oleh lembaga donor.

*Keempat*, kejadian tak terduga. Kejadian tak terduga ini biasanya disebabkan oleh kejadian alam. Bencana alam dapat mengundang animo lembaga donor untuk menyalurkan bantuannya. Contoh nyata dari munculnya isu akibat kejadian tak terduga adalah ketika gempa Yogyakarta 2006 silam.

#### **D. Proses Monitoring dan Evaluasi**

Ada tiga jenis monitoring dan evaluasi (monev) yang terjadi pada dunia kerja LSM. *Pertama*, internal LSM, setiap LSM yang profesional

akan melakukan proses monitoring dan evaluasi program kerja. Orang atau utusan dari LSM akan melakukan proses monev terhadap kerja dari lembaganya sendiri

*Kedua*, internal donor. Lembaga donor juga melakukan monitoring dan evaluasi. Lembaga donor memiliki orang yang bertugas untuk memonitoring dan evaluasi kerja LSM. Ada utusan dari lembaga donor yang ditugaskan untuk memantau kerja LSM. Lembaga donor akan memonitoring dan evaluasi LSM yang menjalankan program kerja mereka.

*Ketiga*, independen. monev independen adalah monev yang bekerja diluar lembaga donor dan LSM. Tidak adak keterikatan khusus antara monev independen dengan lembaga donor dan LSM. Monev independen punya lembaga khusus, meskipun perorangan, monev independen tidak punya ikatan dengan salah satu lembaga itu.

Sementara itu hal yang dimonitoring dan evaluasi terkonsentrasi dalam tiga kegiatan. *Pertama*, keuangan. LSM, khususnya di Yogyakarta, sangat tergantung pada uang yang dihibahkan oleh lembaga donor. Menjadi wajar kemudian bila sebagian lembaga donor sangat ketat dalam melakukan kontrol terhadap uang, karena mereka yang membiayai program kerja yang dijalankan oleh LSM. *Kedua*, administrasi, banyak dari lembaga donor hanya melakukan monitoring dan evaluasi hanya sebatas administrasi, tidak pada apa yang dihasilkan. *Ketiga*, hasil yang dicapai. Walaupun tidak terlalu signifikan, hasil kerja adalah salah satu yang di monitoring dan evaluasi.

Hasil kerja dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, hasil kerja dari program kerja non fisik. *Kedua*, hasil program kerja fisik.

#### **E. Relasi Antar LSM**

Relasi dalam dunia kerja LSM dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, LSM senior/lama dan LSM baru. LSM baru punya strategi tersendiri dalam mencari dana untuk program kerja. Salah satunya dengan cara membangun relasi dengan LSM baru/senior. Hubungan yang terjadi antar LSM senior dan LSM baru dilakukan dengan cara menginduk atau berkoalisi dengan LSM senior. Hal ini terjadi karena LSM kecil sulit untuk mendapatkan dana. Selain itu, LSM kecil juga terkadang tidak mampu untuk mengelola program yang relatif besar.

*Kedua*, antar sesama LSM senior/besar. Persaingan terjadi antara sesama LSM besar yang sama-sama pernah menjalin kerja sama dengan lembaga donor. Dampak dari situasi seperti itu menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar sesama LSM besar. Sehingga, ada sebagian LSM besar melakukan kanalisasi dana. Ada tiga cara LSM besar dalam melakukan kanalisasi pendanaan, yaitu kanalisasi isu, kanalisasi berkelompok, dan kanalisasi geografis.

## **Pembahasan**

### **Wacana: Pengetahuan dan kekuasaan**

Menurut Foucault wacana atau *discourse* merupakan kumpulan pernyataan-pernyataan. Bisa juga dikatakan *enonce* (statmen). Statemen disini bukan merupakan suatu ungkapan atau proposisi. Untuk memperjelas dia menghubungkan *speech act* dengan statemen. Statemen dan *speect act* hanya butuh diterima dengan begitu saja, dan menempatkan statemen dalam konteks aktual dengan jejaring statemen yang lain. *Speech act* menjadi statemen ketika seseorang menyusun dalam suatu prosedur validitas yang pasti, dalam komunitas para ahli, dan lain-lainnya yang kemudian mempunyai konsekuensi sosial yang serius (Santoso dkk, 2007: 171-172).

Bicara pada konteks dunia kerja LSM. Lembaga donor memiliki otonomi dalam menentukan program kerja, karena faktanya yang memberi dana program kerja tersebut adalah lembaga donor. Lembaga donor sebagai suatu lembaga pemilik dana memiliki kewenangan dalam menentukan isu. Statemen atau bentuk wacana tertentu pada suatu isu tetentu akan menjadi sebuah pengetahuan. Isu yang di wacanakan oleh lembaga donor kemudian akan menjadi suatu pengetahuan yang kemudian di sebarakan ke LSM-LSM yang ada di Yogyakarta.

Belum tentu paraktek diskursus itu tampak pada ilmuan-ilmuan paling besar dan paling orisinal, bisa saja regulasi diskursus itu tampak pada tokoh-tokoh biasa dan kurang orisinal (Berthens, 2006: 349). Dalam hal ini LSM memiliki kewenangan dalam membentuk isu. Walaupun kemudian isu yang di

bangun LSM sesuai dengan isu yang sedang *tren*, dan itu bentukan lembaga donor.

Menurut Foucault suatu diskursus memungkinkan untuk menjadi pengetahuan bila terjadi relasi-relasi antar statemen. Kelompok-kelompok statemen dengan statemen lain yang berbeda. Kemudian dia menyebutnya sebagai bentuk diskursif. Pewacanaan isu-isu pada dunia kerja LSM terjadi pewacanaan isu lembaga donor dan pewacanaan isu LSM. Kemudian dia menghubungkan kelompok-kelompok statemen dengan apa yang dia sebut sebagai *enunciative modalities*, yaitu suatu aturan atau hukum yang beroporasi dibelakang statemen yang bermacam-macam. Diantaranya berkaitan dengan siapa yang mempunyai hak untuk menyatakan statemen. Posisi apa yang ditempati subyek yang menyatakan statemen (Santoso dkk, 2007: 175).

Tentunya dalam hal ini lembaga donor memiliki cukup hak untuk menyatakan statemen dibandingkan dengan LSM. Lembaga donor memiliki kedudukan yang lebih “superior” dalam menentukan isu. Hal ini karena lembaga donor yang memiliki uang untuk program kerja LSM. Uang adalah sesuatu yang sangat vital dalam dunia kerja LSM. Lembaga donor menempati posisi yang sangat strategis. Pengetahuan yang memadai tentang suatu isu tertentu memungkinkan lembaga dana untuk menebar pegelaran kuasa pada LSM.

Seperti diungkapkan Foucault, “kekuasaan membuat gila” namun kekuasaan itu menciptakan dan melahirkan objek pengetahuan yang baru.

Sebaliknya, pengetahuan menciptakan pengaruh-pengaruh kekuasaan. Tanpa pengetahuan, kekuasaan tidak mungkin dijalankan, pengetahuan tidak mungkin tidak melahirkan kekuasaan (Sarup: 2008:113). Pengetahuan yang dimiliki lembaga dana akan menciptakan kekuasaan pada LSM. Pengetahuan tentang isu yang dominan dan tidak seimbang antara LSM dan lembaga donor, pegelaran kuasa lembaga donor semakin memungkinkan terjadi.

Pola-pola hubungan antara LSM dan lembaga donor cenderung bersifat *top-down*. Mengingat yayasan cenderung menjadi organisasi yang hierarkis (Fakih, 2010: 156). Lembaga dana memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan visi, misi, maupu program LSM. Kerja sama yang seimbang antara lembaga donor dan LSM tidak memungkinkan terwujud karena hubungan yang tidak seimbang atara keduanya. Hubungan yang tidak seimbang tersebut diakibatkan oleh ketimpangan infrastruktur, pemahaman isu, dan kapasitas LSM. Sehingga lembaga donor mempunyai cukup ruang untuk “bermain” dalam pewacanan isu dari program kerja LSM yang kemudian diikuti dengan produksi kekuasaan. Lembaga donor menebar kekuasaan melalui pengetahuan. Pengetahuan tidak merupakan pengungkapan samar-samar dari relasi kuasa tetapi pengetahuan berada didalam relasi-relasi kuasa itu sendiri. Kekuasaan memproduksi pengetahuan, bukan saja karena kuasa berguna bagi pengetahuan, tetapi pengetahuan menyediakan kuasa (Bertens, 2006: 355). Lembaga-lembaga dana memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan membentuk agenda kerja sama LSM. Banyak agenda LSM pada dasarnya ditentukan oleh lembaga donor.

Menurut Foucault tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. sebaliknya tidak ada pengetahuan tanpa kuasa. Pengetahuan itu tidak mungkin bersifat netral dan murni dan selalu bersifat politis (Foucault, 2006:255). Kemudian apa pengetahuan yang disebar lembaga donor ?. Seperti yang kita tahu bahwa semua kegiatan yang dilakukan lembaga donor di Yogyakarta selalu terkait dengan demokratisasi. Seperti keterbukaan informasi publik, pluralisme, masyarakat terbuka dan sebagainya, semua terkait demokratisasi.

Menurut Widjajanto (2007: 89), campur tangan lembaga donor dapat terjadi apabila para donor tersebut menganggap bahwa tanpa adanya bantuan dari mereka, suatu negara tidak akan menjadi negara yang sejati menerapkan nilai-nilai demokratisasi. Dekmokratisasi menjadi *tren* isu di kalangan dunia LSM. Lembaga donor selalau berbicara tentang demokratisasi. sementara, demokratisasi adalah bentuk lain dari moderenisme ala barat. Demokrtisasi adalah roda ideologis yang menggerakkan kapitalisme, matrelialisme dan moderenitas (Fauzi, 2005: 12). LSM hanya menjadi perpanjangan dari lembaga donor. Lembaga donor mengangkat dan menyebarkan isu demokratisasi. LSM mengadopsi isu yang dibentuk lembaga donor. Ketergantungan yang sangat besar pada lembaga donor menyebabkan LSM sulit untuk tidak mengikuti wacana lembaga donor.

### ***Panopticon: Monitoring dan Evaluasi Sebagai Pendisiplinan***

Menurut Foucault, kuasa tidak bekerja melalui jalan penindasan, dan represi, melainkan melalui jalan normalisasi dan regulasi (Bertens, 2006: 357). Begitu juga halnya pada dunia kerja LSM. Lembaga donor melakukan normalisasi dan regulasi pada proses kerja LSM. Normalisasi dan regulasi tersebut tergambar monitoring dan evaluasi.

Sementara itu normalisasi dan regulasi bagian dari pendisiplinan. Sama halnya pada monitoring dan evaluasi berguna untuk pendisiplinan. Dengan monitoring dan evaluasi para pekerja LSM akan bekerja sebaik mungkin, tidak keluar dari ketentuan lembaga donor, sehingga LSM akan sendirinya disiplin. Karena menurut Bertens (2006: 357), pekerjaan merupakan suatu cara untuk melatih dan menanamkan disiplin. Sementara disiplin merupakan teknik kuasa, bukan sebuah institusi (Santoso, 2007: 183).

Kuasa disipliner merupakan sistem pengawasan yang dibatinkan sampai pada titik di mana setiap orang menjadi pengawas bagi dirinya sendiri. Proses mengawasi diri sendiri ini menurut Foucault disebut *Panopticon* (Sarup, 2008: 103). Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan lembaga donor terjadi paktek *Panopticon*. Dengan monitoring dan evaluasi, para pekerja LSM akan diawasi, dinilai, dan dikontrol oleh lembaga donor. Kemudian secara bertahap pekerja LSM akan mengawasi perilaku mereka sendiri. Menyesuaikan pelaporan program kerja mereka dengan ketentuan lembaga donor. LSM akan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan lembaga donor.

Bersamaan dengan itu LSM akan melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap diri mereka sendiri, yang kemudian dinamakan monev internal LSM.

Dengan pendisiplinan kerja, LSM diharapkan dapat bekerja sebaik mungkin. Bekerja dengan cermat, teliti, agar tidak terjadi kesalahan. Apabila hasil yang diharapkan tidak sesuai harapan donor maka akan berdampak pada reputasi LSM itu sendiri. *Panopticon* menciptakan subjek yang bertanggung jawab atas kedudukan dirinya sendiri (Sarup: 2008: 115). Kerja yang baik itu kemudian akan kembali pada lembaga donor selaku pemberi dana. Semua itu dikendalikan oleh lembaga donor. Lembaga donor punya hak pendisiplinan yang tak terbantahkan.

Menurut Foucault, melalui kuasa disiplin, memungkinkan suatu pekerjaan untuk dimanipulasi, ditundukan dimamfaatkan, ditransformasikan, dan diperbaiki (Santoso dkk, 2007:183). Bukan tidak mungkin dalam monitoring dan evaluasi kerja LSM akan terjadi manipulasi dan pemamfaatan, karena lembaga donor menentukan aturan monev itu sendiri. Lembaga donor punya hak kuasa dalam memonitoring dan evaluasi kerja LSM.

### **Kritik Idiologi CSR**

CSR tidak lagi hanya sebatas tindakan amal dan kebaikan sosial dari perusahaan ke masyarakatnya, ia telah melangkah lebih jauh, yakni sudah menjadi strategi bisnis. Menurut Fukuyama, kaum kapitalis dengan dongeng pasar bebasnya dan keuntungannya akan menimbulkan dampak negatif, maka untuk itu harus ada kebijakan alternatif yang didasarkan atas kebijakan etis dan

moral, baik pada individu maupun perusahaan. Maka konsep tentang CSR merupakan salah satu konsep yang relevan untuk mengatasi hal tersebut (Wahyudi & Azheri, 2008: xxii).

Selain itu campur tangan pemerintah dengan menggodok undang-undang tentang CSR juga memperkeruh motivasi dari CSR itu sendiri. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang PT, mewajibkan bagi seluruh perusahaan yang bergerak dibidang eksplorasi sumber daya alam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan adanya undang-undang tentang pengaturan CSR, kini program CSR sudah menjadi tuntutan bagi perusahaan untuk beramal pada masyarakatnya. Sehingga secara tidak langsung, perusahaan tidak menjadikan CSR sebagai bentuk kesukarelaan namun sudah menjadi kewajiban.

Kemudian pertanyaannya apa hubungan praktik CSR dengan lembaga donor dan LSM? Menurut salah satu narasumber penulis, sebagian dari uang yang masuk ke lembaga donor merupakan uang dari perusahaan besar Amerika dan Eropa. Kemudian uang tersebut disalurkan kepada LSM di Indonesia khususnya di Yogyakarta. Masuknya uang dari perusahaan asing ke lembaga donor kemudian disalurkan ke LSM di Indonesia Ini menunjukan adanya penjajahan dalam bentuk baru atau biasa disebut neokolonialisme.

Bergabungnya kekuatan besar tersebut yang melanggengkan kuasa kapitalisme, yakni korporat besar dengan strategi CSRnya, lembaga donor dengan uang bantuannya, serta LSM dengan dengan kedekatannya pada

masyarakat akar rumput merupakan suatu ciri neoliberalisme. Menurut Wibowo (Saksono, 2009: 137), kehadiran neoliberalisme tidak hanya dirasakan pada bidang ekonomi saja, namun dapat dirasakan hingga seluruh sendi kehidupan masyarakat hingga pelosok dunia. Neoliberalisme melalui dukungan komputer, teknologi yang canggih serta kekuatan kapitalis lokal yang bergabung dengan kapitalis global, bersama-sama mengeruk kekayaan bumi sembari menjanjikan kemakmuran global yang tidak kunjung datang.

Sementara itu demokratisasi yang menjadi *trend* isu saat ini yang dikumandangkan oleh lembaga dana asing tak lebih sebagai roda ideologis yang menggerakkan pada neoliberalisme. Demokrasi tidak hanya sebatas pemilu yang bebas, jujur dan adil serta kebebasan berpolitik dan kebebasan sipil. Tapi lebih dari itu, isu tentang demokratisasi merupakan langkah awal menuju liberalisme. Kebebasan rakyat dengan hak suara yang dimiliki hanya dibutuhkan ketika pemilu saja. Selebihnya rakyat dikhianati, ditipu, kebijakan publik tidak lagi memihak rakyat. Justru sebaliknya, kebijakan hanya diperuntukan untuk para penguasa, pengusaha, dan para birokrat, yang ironisnya justru mereka dipilih oleh rakyat. Menurut Mulgan (Pontoh, 2005: viii), prinsip-prinsip demokrasi seperti keterbukaan, kebebasan, dan kompetisi telah dibajak oleh kekuatan modal. Yang disebut keterbukaan, hanya berarti keterbukaan untuk berbisnis bagi pemilik modal, kebebasan artinya kebebasan untuk berinvestasi bagi perusahaan nasional, kompetisi dimaknai sebagai persaingan pasar bebas, yang kesemuanya adalah watak neoliberalisme.

## Penutup

Setelah melakukan penelitian, mulai dari merumuskan masalah, pengumpulan data, proses wawancara mendalam dengan beberapa narasumber hingga pembahasan dengan teori kritik sosial, penulis menemukan beberapa kesimpulan:

1. Ada beberapa cara proses pengajuan program dunia kerja LSM yaitu, pengumuman terbuka, sosialisasi terbatas dan hubungan langsung.
2. Alasan dan pertimbangan lembaga donor dalam memberikan dana ke LSM. *Pertama*, kepercayaan yang dilandasi kinerja, reputasi, kapasitas dari LSM (kapasitas keorganisasian dan kapasitas secara hukum), dan popularitas. *Kedua*, pertemanan dan rekomendasi.
3. Proses penentuan isu. Ada beberapa cara dalam proses penentuan isu. *Pertama*, lembaga donor mewacanakan isu, ini adalah hal yang paling lazim terjadi. *Kedua*, LSM mewacanakan atau menentukan isu. Hal ini biasanya tergantung kondisi masyarakat sekitar LSM tersebut. *Ketiga*, lembaga donor mengarahkan atau mendikte isu yang di kerjakan oleh LSM. *Keempat*, atau yang terakhir adalah kejadian tak terduga, seperti bencana alam.
4. Proses monitoring dan evaluasi. Ada tiga hal pokok yang dimonitoring dan evaluasi yaitu administrasi, keuangan dan hasil. Sementara ada beberapa metode dalam melakukan monev di dunia kerja LSM, yakni monev internal lembaga donor, monev internal LSM, monev secara independen.

5. Relasi atau hubungan antar LSM. *Pertama*, Hubungan LSM Senior dan Junior. *Kedua*, Hubungan antar sesama LSM besar terjadi kanalisasi dana yang termanifestasikan kedalam kanalisasi isu, kanalisasi berkelompo dan kanalisasi geografis.

Dari hasil temuan penelitian diatas, penulis berusaha melakukan refleksi terhadap beberapa teori-teori sosial yang relevan. Hasil renungan teotitik atas temuan tersebut adalah:

1. Lembaga donor malalui pewacanaan isu, bertindak lebih superior dan sangat dominan. Melalui pengetahuan tentang isu, lembaga donor menebar kuasanya pada LSM. Sementara LSM sebagai lembaga subordinat dengan pengetahuan yang tidak berimbang, hanya akan berusaha mencocokkan tanpa ada pertanyaan yang kritis.
2. Relasi kuasa yang terjadi antara lembaga donor dan LSM adalah penyebaran isu demokratisasi. Pengetahuan lembaga donor tentang idiologi demokrasi dijadikan alat untuk menggelar kuasa-kuasa pada masyarakat sipil. Sementara LSM dengan pengetahuan yang sangat timpang, hanya menjadi perpanjang tangan dari lembaga donor untuk menyebarkan isu demokratisasi.
3. Melalui praktik *panopticon*, monitoring dan evaluasi dijadikan sebagai alat pendisiplinan kerja LSM. Agar kerja LSM dapat dinormalisasikan serta dikontrol, maka lembaga donor menerapkan praktik *panopticon*.
4. Kritik atas CSR. CRS perusahaan tidak hanya sebatas tindakan *filantropis* semata. Kini CSR sudah menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan

kapitalis. Lembaga donor dengan mewacanakan isu demokratisasi yang kegiatannya di jalankan oleh LSM, merupakan upaya penyebaran ideologi neoliberalisme, karena demokratisasi adalah roda ideologis yang menggerakkan kapitalisme, modernisme dan materialisme.

5. Melalui bantuan lembaga donor ke LSM terjadi praktik neokolonialisme. Dengan kedok bantuan pada masyarakat negara miskin, negara dunia pertama berusaha menguasai dan menjajah dunia ketiga agar tunduk dan patuh pada ideologi mereka. Kolonialisme kini berjalan melalui penguasaan atas aset di suatu negara.

Keterbatasan penulis dalam penelitian ini adalah terdapat pada kurangnya data dari dokumen-dokumen kinerja LSM seperti proposal pengajuan dana dan program, serta tidak semua aktivis LSM di Yogyakarta dapat di wawancara. Terlebih tidak adanya narasumber dari lembaga donor dalam penelitian ini hingga menyebabkan data yang diambil tidak berimbang. Selain itu, objek kajian dari penelitian ini hanya terbatas untuk LSM di Yogyakarta.

Saran untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama bisa dilakukan adalah melakukan pengambilan data dokumentasi dari kinerja LSM seperti proposal pengajuan dana dan program, serta melakukan wawancara dengan lembaga donor agar data yang di peroleh berimbang. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya yang merasa mampu dan mempunyai waktu yang cukup, diharapkan dapat melakukan penelitian dengan objek kajian LSM seluruh Indonesia.

## Daftar Pustaka

1. Jones, Pip. 2009. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-modernisme*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
2. Santoso, Listiyono, dkk. 2007. *Seri Pemikiran Tokoh: Epistemologi Kiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
3. Bertense, K. 2006. *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Jakarta: Gremedia Pusta Utama.
4. Sarup, Madan. 2011. *Panduan Pengantar Untuk Memahami Postrukturalisme & Posmodrenisme*. Yogyakarta: Jalasutra
5. Widjajanto, Andi. 2007. *Transnasionalisasi Masyarakat Sipil*. Yokyakarta: LKiS Pelangi Nusantara Yogyakarta.
6. Fakhri, Mansour. 2010. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM*. Yogyakarta: Insist Press
7. Fauzi, Noer. 2005. *Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Insist Press
8. Moleong, Lexi J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosadakarya.
9. Audifax. 2008. *Research: Sebuah Pengantar untuk Mencari-Ulang Metode Penelitian dalam Psikologi*. Yogyakarta: Jalasutra.
10. 2003. *Direktori Peacebuilding Indonesia: Indonesian Peacebulding*. Yogyakarta: Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Atmajaya
11. Poerwanto. 2010. *Corporate Social Responsibility: Menjinakan Gejolak Sosial di Era pornoografi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

12. Widjaja, Gunawan & Yeremia Ardi Pratama. 2008. *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Penebar Swadaya.
13. Editor, Jordan, Lisa, Tuijl Peter Van. 2009. *Akuntabilitas LSM: Politik, Prinsip & Inovasi*. Jakarta: LP3ES.
14. Pontoh, Coen Husain. 2005. *Malapetaka Demokrasi Pasar*. Yogyakarta: Resist Book
15. Wahyudi, Isa & Busyra Azheri. 2011. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*. Malang: Setara Press.
16. Saksono, Ign. Gatut. 2009. *Noelibralisme vs Sosialisme: Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Forkoma PMKRI

### **Online**

Kompasnia.com